

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. M Mangunhardjana., 1986, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 195
- Atmasasmita Romli. 1975. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009), 90
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 19
- C.I Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Chazawi Adami, (2002), *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 78.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010), h. 59
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. (Surabaya : Target Press, 2003), 53.
- Departemen dan Pendidikan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet 2, hal.23
- Dirjosisworo Soejono, *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi (Pemasyarakatan)*. hlm. 199-200.
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Cet. 3, (Jakarta, 2002, hal. 473.
- Mahrus, K. (2018). *Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan*. 1–92.

- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, (Yogyakarta, 2003), 91
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 37.
- Pandjaitan Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC,(Jakarta, 2008), 23.
- Purnomo Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, (Liberty, Yogyakarta, 1985), 125.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. (Bandung: Alfabeta, 2010), 47.
- Rodiyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 12-13.
- Shafira, M., & Achmad, D., *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. (Pustaka Media, Bandar Lampung, 2020), h. 69.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 7.
- Soekanto Soerjono, 2009, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press), Cet. 11.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 42.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006). Hlm 12.
- Soemadipradja Achmad R. S. dan Romli Atmasasmita, 1979. *Sistem Pemasyarakatan Di Inodonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta.

B. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian dan Lain-lain).

Abdullah, R. H, 2015, “Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. IX, hal.53

Elisabert Maria Novena Nainggolan and Ukas, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Batam),” *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (2019): 1– 10.

Febrian, A. M. E. (2016). *PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA MENURUT UU NO 12 TAHUN 1995 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar Skripsi. 1995(12).*

Fuadi, Samil, Mohd Din, and Dahlan Ali, “Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3, no. 1 (2015): 1-10.

Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*,27(3), 445-458.

Hatmoko, R. Y., Pujiyono, & Sularto, R. . (2016). Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang. *Diponegoro Law Review*, 5(3), 17.

Khomaini, Thalib, and Nuh, “Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.” Khomaini, Thalib, H., & Nuh, M. S. (2021). Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Journal of Lex Generalis*, 2(2), 415–430.

Poernomo, A. A. (2021). Disparitas Norma Pengaturan Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Pandemi Ditinjau

Dalam Perspektif Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8(1), 18-46.

Pratiwi, S. A., & Lemes, I. N. (2019). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja. *Kertha Widya*, 6 (1), 20–35.

Simon, Roger P, David A Greenber, Michael J Aminoff. *Clinical Neurology* edisi internasional 7. USA: McGraw-Hill; 2009.

Situmorang, V. H., (2019). Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13 (1), 85-98.

Sobirin, S. (2022). Pelaksanaan Kebijakan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika. *Jurnal JURISTIC*, 3(03), 241.

Sudarto, S.H., 1990, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP.

Sulianto, H. (2019). Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat. *Jurnal Rechtsens*, 7(1), 1–17.

Tampubolon Eric. (2017). Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. *Jom VISIP*, 4(1), 1–14.

Utami, P.N., & Indonesia, H. A. M. R. (2017)., Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *J. Penelit. Huk.* E-ISSN, 2579, 856.

Wahdanigsi, Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

UUD NRI 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.